

DEMOKRASI DAN TATA KELOLA KEUANGAN PUBLIK INDONESIA PADA ERA DESENTRALISASI

Dina Cahyani¹, Eko Ribawati²

¹ 5554230066@untirta.ac.id, ² eko.ribawati@untirta.ac.id

^{1,2} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

The implementation of fiscal decentralization since 2001 has become a pivotal milestone in transforming Indonesia's governance system and public financial management. The delegation of fiscal authority to local governments is expected to enhance regional financial independence while strengthening transparency and accountability in budget administration. This study aims to analyze the relationship between democracy and public financial governance in the era of fiscal decentralization, as well as to assess the application of transparency, accountability, and public participation at the regional level. Using a qualitative approach through a literature review method, this research draws on secondary sources including scholarly publications, government documents, and recent academic studies. The findings indicate that fiscal decentralization has the potential to reinforce democratic fiscal practices, although its implementation is still limited by bureaucratic capacity constraints, the influence of local political elites, and weak public oversight mechanisms. Conversely, the adoption of digital technologies in financial governance has enhanced efficiency, transparency, and accountability, despite requiring stronger human resource capacity and consistent political commitment.

Keywords: *Accountability, Democratic Fiscal Governance, Decentralization, Public Participation*

ABSTRAK

Penerapan *desentralisasi fiskal* sejak tahun 2001 telah menjadi tonggak penting dalam perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan *keuangan publik* di Indonesia. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara sistem demokrasi dan tata kelola keuangan publik dalam era desentralisasi fiskal, serta menelaah penerapan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di tingkat pemerintahan daerah. Pendekatan penelitian menggunakan metode studi kepustakaan berbasis data sekunder dari publikasi ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan literatur akademik terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memperkuat praktik demokrasi fiskal, namun efektivitasnya masih terkendala oleh lemahnya kapasitas birokrasi, pengaruh elit politik lokal, dan keterbatasan mekanisme pengawasan publik. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, meskipun masih memerlukan dukungan sumber daya manusia dan komitmen politik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Demokrasi Fiskal, Desentralisasi, Partisipasi Publik*

I. PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi fiskal yang mulai diterapkan sejak tahun 2001 telah mengubah arah tata kelola pemerintahan dan sistem keuangan publik di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan lokal. Reformasi tersebut menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan instrumen utama untuk memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah (Aldi Nurrochman & Oktavia, 2024).

Namun, capaian pelaksanaan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah masih tinggi, sementara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik belum merata. Sistem pelaporan keuangan daerah masih menghadapi kendala dalam hal pengawasan, integritas data, serta pemanfaatan teknologi digital. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan tata kelola keuangan publik yang lebih transparan dan partisipatif. Penelitian terbaru menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah (Badewin et al., 2025).

Dari perspektif demokrasi, desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan pelimpahan kewenangan anggaran, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan fiskal. Keterlibatan warga dalam proses *participatory budgeting* menjadi mekanisme penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi kebijakan publik. Partisipasi publik melalui forum *Musrenbang* dan konsultasi terbuka merupakan wujud nyata dari praktik demokrasi deliberatif dalam pengelolaan keuangan daerah (Affandi et al., 2023).

Penguatan tata kelola keuangan publik berbasis nilai-nilai demokrasi menjadi suatu keharusan di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Prinsip partisipasi, keterbukaan, serta akuntabilitas perlu diintegrasikan pada seluruh tahapan manajemen keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Semakin matang praktik demokrasi lokal, semakin besar pula desakan publik agar pemerintah menerapkan prinsip *good governance* secara konsisten dan berkeadilan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji keterkaitan antara sistem demokrasi dan tata kelola keuangan publik di Indonesia pada era desentralisasi fiskal. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitasnya. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori mengenai demokrasi fiskal serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis keterkaitan antara demokrasi dan tata kelola keuangan publik di Indonesia pada era desentralisasi fiskal. Pendekatan ini dipilih karena bersifat deskriptif-konseptual, memungkinkan penelitian memahami fenomena sosial-politik dan praktik pengelolaan keuangan publik secara mendalam tanpa mengandalkan data kuantitatif atau survei lapangan. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen resmi, jurnal akademik, laporan

pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan content analysis, meliputi identifikasi tema utama, klasifikasi informasi, dan sintesis temuan untuk memahami pola hubungan antara demokrasi dan kualitas tata kelola keuangan publik. Metode ini memungkinkan interpretasi fenomena sosial-politik secara sistematis dan komprehensif, sekaligus mengaitkannya dengan teori demokrasi dan tata kelola publik, sehingga menghasilkan kajian yang kontekstual dan relevan bagi pengembangan literatur serta praktik kebijakan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan Demokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Publik pada Era Desentralisasi Fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peran penting dalam membentuk tata kelola keuangan publik yang lebih terbuka dan akuntabel di Indonesia pada masa desentralisasi fiskal. Demokrasi sebagai sistem yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menempatkan partisipasi masyarakat, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai dasar dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah (Putri Ayu Nabila et al., 2024). Hasil analisis literatur juga menggambarkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Fahrizal & Bintoro, 2022). Namun, efektivitas ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dan profesionalitas birokrasi daerah, sebagaimana dijelaskan Elsy, (2013) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada komunikasi, sumber daya manusia, dan struktur birokrasi. Temuan lebih lanjut

menunjukkan bahwa tiga fungsi utama keuangan publik alokasi, distribusi, dan stabilisasi hanya dapat berjalan optimal jika dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas (Putra et al., 2025). Data Kementerian Keuangan (2024) menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah dengan sekitar 70% pendapatan bergantung pada transfer pusat. Selain itu, digitalisasi melalui Digipay dan SP2D Online terbukti meningkatkan efisiensi dan kontrol transaksi (Suryanto & Dai, 2025) namun tantangan seperti keamanan data dan keterbatasan SDM masih muncul. Menurut temuan (Hardianto et al., 2024) menunjukkan bahwa ketimpangan fiskal antarwilayah masih tinggi, di mana daerah dengan kapasitas fiskal rendah memiliki tingkat kemiskinan yang lebih besar. Dalam aspek akuntabilitas, akuntansi sektor publik berperan penting sebagai instrumen transparansi (Biduri, 2018; Rossieta et al., 2023), Sementara itu, laporan (BPK, 2025) menyatakan bahwa sekitar 60% pemerintah daerah belum mencapai kategori akuntabilitas “baik”, menandakan masih lemahnya sistem tata kelola keuangan daerah.

Pembahasan

Tantangan Demokrasi Fiskal dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Berkeadilan

Pembahasan menunjukkan bahwa meskipun demokrasi menyediakan landasan nilai berupa partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, penerapannya dalam tata kelola keuangan publik masih belum berjalan secara optimal. Demokrasi Indonesia yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi sumber daya yang adil (Putri Ayu Nabila et al., 2024). Namun, efektivitas desentralisasi fiskal tetap dibatasi oleh kapasitas birokrasi daerah, profesionalitas SDM yang belum merata, serta kurangnya integrasi sistem informasi (Elsy, 2013;

Fahrizal & Bintoro, 2022). Kondisi ini turut mempengaruhi keberjalanan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam keuangan publik yang berorientasi pada keadilan sosial (Batin, 2022; Putra et al., 2025).

Rendahnya kemandirian fiskal daerah sebagaimana ditunjukkan dalam laporan Kementerian Keuangan (2024) menandakan bahwa otonomi keuangan belum sepenuhnya tercapai, sehingga upaya menuju tata kelola yang demokratis masih terbatas. Digitalisasi fiskal melalui Digipay dan SP2D Online memang mendorong efisiensi serta transparansi (Suryanto & Dai, 2025), tetapi kesiapan daerah terkait keamanan data dan kapasitas teknis masih menjadi tantangan. Ketimpangan fiskal antarwilayah yang masih besar (Hardianto et al., 2024) juga menunjukkan bahwa desentralisasi belum berhasil mengurangi ketidakmerataan ekonomi.

Dari sisi akuntabilitas publik, pelaporan keuangan terbuka seharusnya menjadi alat bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran (Biduri, 2018; Rossieta et al., 2023). Meskipun partisipasi publik melalui Musrenbang atau audit sosial dapat memperkuat legitimasi kebijakan fiskal, temuan BPK (2025) mengungkap bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki tingkat akuntabilitas yang rendah. Dengan demikian, demokrasi fiskal yang ideal hanya dapat terwujud apabila nilai demokrasi, kapasitas kelembagaan, teknologi, dan partisipasi publik diperkuat secara bersamaan.

IV. KESIMPULAN

Demokrasi memegang peran penting dalam membentuk pengelolaan keuangan publik pada era desentralisasi fiskal di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi warga, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi yang mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih terbuka. Meskipun

demikian, pelaksanaannya masih terhambat oleh kapasitas birokrasi yang terbatas, ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat, serta lemahnya mekanisme pengawasan publik.

Penguatan tata kelola keuangan berbasis demokrasi hanya dapat dicapai apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses anggaran. Dengan langkah tersebut, desentralisasi fiskal berpotensi menghasilkan pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Batin, M. H. (2022). *Keuangan Publik* (1st ed.). Kencana.
- Biduri, S. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. UMSIDA Press.
- Elsye, R. (2013). *DESENTRALISASI FISKAL* (1st ed.). Alqaprint Jatinangor.
- Rossieta, H., Muktiyanto, A., & Geraldina, I. (2023). *Tata Kelola Sektor Publik*. Universitas Terbuka.

Jurnal Ilmiah

- Affandi, M. A., Marijan, K., & Windyastuti, D. (2023). Participatory Budgeting in Indonesia: from the Policy Innovation to the Democracy Innovation. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 527–565.
<https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p527-565>
- Aldi Nurrochman, I., & Oktavilia, S. (2024). of Fiscal Decentralization in Indonesia. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 7(2), 130–140.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php>

- p/efficient.<https://doi.org/10.15294/5d-dgp063>
- Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831–842. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- Fahrizal, M. F., & Bintoro, Y. J. (2022). Desentralisasi Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(1), 73. <https://doi.org/10.33370/jmk.v19i1.734>
- Hardianto, H., Ismail, T., & Sapiri, M. (2024). Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat). *Al-Buhuts*, 20(1), 209–228.
- Putra, S. K., Wahyu Setiani, Dinda Astuti, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 408–416. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5380>
- Putri Ayu Nabila, Padilatul Ilmi NST, Intan S, Siti Fatimah, & Bambang Trisno. (2024). Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 134–142. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1313>
- Suryanto, S., & Dai, R. M. (2025). Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi Dan Transparansi. 13, 96–111.
- Laporan Resmi/Dokumen Pemerintah**
- BPK. (2025). *LAPORAN KINERJA BPK TAHUN 2024 Penyedia Konten Sekretariat Jenderal Direktorat Utama Perencanaan , Evaluasi , dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Inspektorat Utama Direktorat Utama Pembinaan*.
- Republik Indonesia, K. K. (2024). *Laporan Kinerja Badan Kebijakan Fiskal*. 1–144.